

**PENGARUH KUALITAS PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TERHADAP KEMISKINAN PEREMPUAN DI KALIMANTAN BARAT**

Yarlina Yacoub¹, Ana Fitriana², Pratika Linanda³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Atin Sumaryanti^{4*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas OSO, Indonesia

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh usia harapan hidup perempuan, harapan lama sekolah perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan dan pemberdayaan perempuan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Data dalam penelitian ini adalah data panel, dari tahun 2010 sampai tahun 2022), pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dan sumber data BPS. Analisis menggunakan regresi linier berganda dengan program Eviews 12. Temuan dalam penelitian ini, variabel usia harapan hidup perempuan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan, harapan lama sekolah perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan, rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan dan indeks pemberdayaan perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan. Hal ini menandakan bahwa semakin luasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas memberi pengaruh kepada meningkatnya kesejahteraan perempuan dan menurunkan kemiskinan perempuan. Sementara karena masih rendahnya partisipasi perempuan diruang publik sehingga masih belum bisa mendorong peningkatan kesejahteraan perempuan dan akibatnya masih banyak perempuan yang menderita kemiskinan.

JEL: J16, J22, O17

Keywords: *Women's Education, Women's Health, Gender Empowerment, Women's Poverty.*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi permasalahan pembangunan yang sangat kompleks, karena terkadang merupakan suatu lingkaran yang tak berujung, sehingga perlu kebijakan dan cara yang sangat komprehensif untuk mengendalikan dan mengatasinya. Teori Nurkse yang terkenal dengan lingkaran kemiskinan menggambarkan sulitnya keluar dari jerat kemiskinan. Kemiskinan salah satunya bermula dari keterbelakangan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas manusia sebagai akibat dari rendahnya pendidikan dan kesehatan akan mengakibatkan pada rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan memunculkan kemiskinan dan kemiskinan mengakibatkan rendahnya akses pada pendidikan dan kesehatan sehingga memunculkan keterbelakangan, dan seterusnya begitu.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa kemiskinan lebih banyak dirasakan oleh kelompok perempuan. Ini merupakan indikasi adanya ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yang merupakan gambaran dari ketidakadilan gender dan perempuan lebih miskin daripada laki-laki. Kondisi di Indonesia, tahun 2022 sebanyak 9,68 persen perempuan hidup di bawah garis kemiskinan, sementara laki-laki 9,40 persen. Menelisik data pengeluaran perkapita sebagai indikator dari kesejahteraan, tahun 2021 jumlah pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp 15,77 juta, lebih tinggi dari pengeluaran per kapita perempuan hanya sebesar Rp 9,05 juta. Data ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksetaraan gender.

Pembahasan tentang gender sangat didominasi tentang masalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan (Raditya, 2021). Ini berakibat bahwa hasil pembangunan tidak dirasakan secara maksimal oleh banyak perempuan. Sehingga kenyataan yang dirasakan bahwa kesejahteraan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini didukung oleh data, dimana sumbangan pendapatan perkapita perempuan terhadap total pendapatan perkapita Indonesia. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa sumbangannya pendapatan perkapita perempuan hanya sebesar 37,22% (tahun 2021) dan 37,17% (tahun 2022). Effendi dalam Santoso (2004), kaitannya dengan pembangunan dan kesetaraan gender, ada tiga perspektif dalam melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif mutu modal manusia (human capital), perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal serta perspektif gender.

Secara umum ketidaksetaraan gender dari aspek mutu modal manusia tergambar dari beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses pendidikan, akses kesehatan, diskriminasi dalam norma sosial, partisipasi angkatan kerja, pendapatan, daya tawar suara atau pendapat baik dalam keluarga maupun diruang publik, dan banyak hal lainnya lagi. Hal ini dipertegas Wodon dan De La Briere (2018), bahwa di banyak negara, pencapaian pendidikan, lapangan kerja, partisipasi diruang publik, rata-rata anak perempuan tetap lebih rendah daripada anak laki-laki. Selanjutnya menurut Sabilla (2023), perempuan lebih rentan dari laki-laki, kesenjangan pendidikan laki-laki dan perempuan, yang memberikan sumbangan pada kemiskinan perempuan, sulitnya akses kesehatan perempuan dan ini lihat dari indikator kesehatan perempuan yang lebih rendah, sehingga perempuan lebih rentan kepada kemiskinan.

Untuk ketimpangan gender, khususnya untuk melihat kualitas perempuan, peran perempuan dan kesejahteraan perempuan salah satunya menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan merujuk pada metodologi yang digunakan oleh United Nation Development Programme (UNDP). Tahun 2021 Indonesia pada peringkat 110 IKG dunia dengan nilai IKG 0,390. IKG Kalimantan Barat sebesar 0,483 dan diatas IKG nasional, serta menempatkan Kalimantan Barat pada kelompok 5 (lima) besar dengan IKG diatas nasional (BPS, 2022). Artinya bahwa ketimpangan gender di Kalimantan Barat cukup tinggi dan diatas ketimpangan gender nasional. Memperkuat data IKG, terutama Kalimantan Barat, membandingkan juga dengan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), bahwa IPG sebesar 87,61 dan IDG sebesar 73,18 artinya bahwa nilai untuk keduanya ini masih jauh dari kesetaraan gender yaitu dengan angka yang mendekati 100. Semua data yang ditampilkan menunjukkan posisi kualitas dan kesejahteraan perempuan dalam pembangunan masih jauh dibawah laki-laki.

Pengeluaran perkapita dapat digunakan sebagai tolok ukur kesejahteraan. Perbedaan dari pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki dapat digunakan sebagai pembanding kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki aatau kesejahteraan gender dan dapat digunakan sebagai proxy dari kemiskinan gender. Semakin tinggi angka rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap pengeluaran perkapita laki-laki, maka kemiskinan perempuan semakin menurun dan sebaliknya. Sementara ukuran kesetaraan gender terutama perempuan yang berhubungan dengan kualitas SDM adalah dimensi pendidikan perempuan dan dimensi kesehatan perempuan serta peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan dinilai dari indikator pendidikan perempuan dan indikator kesehatan perempuan yang diwakili oleh harapan lama sekolah (HLS) perempuan, rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan dan usia harapan hidup (UHH) perempuan, sementara peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dipaparkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1. 1

Harapan Lama Sekolah Perempuan. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan, Usia Harapan Hidup Perempuan, Rata-Rata Pengeluaran Perkapita (PPP) Laki-laki dan Perempuan di Kalimantan Barat Tahun 2010-2022

Ta hun	HLS Pr (Tahun)	RLS Pr (Tahun)	UHH Pr (Tahun)	IDG (Tahun)	PPP Lk (ribu Rp)	PPP Pr (ribu Rp)
2010	10,70	5,61	67,11	55.26	11.478	5.119
2012	11,05	5,97	71,47	59.34	12.036	5.276
2014	11,62	6,29	71,75	64.10	12.341	5.653
2016	12,30	6,44	71,89	64.37	12.474	5.726
2018	12,69	6,62	72,16	64.47	13.240	6.118
2020	12,89	6,84	72,67	68.07	13.314	6.134
2022	12,99	7,18	73,00	73.18	13.950	6.417

Sumber : BPS Indonesia

Dari tahun 2010 – 2022 (Tabel 1.1) di Kalimantan Barat, untuk dimensi kualitas SDM perempuan dan pemberdayaan perempuan serta pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan. Dari dimensi kualitas SDM perempuan, baik itu indikator pendidikan perempuan maupun indikator kesehatan perempuan mengalami peningkatan kualitas, dimana angka HLS, RLS dan UHP meningkat tiap tahun. HLS perempuan tahun 2010 = 10,70 tahun dan tahun 2022 meningkat menjadi 12,99 tahun. RLS perempuan tahun 2010 = 5,61 tahun dan tahun 2022 meningkat menjadi 7,18 tahun. UHP perempuan tahun 2010 = 67,11 tahun meningkat menjadi 73,00 ditahun 2022. Sementara IDG juga mengalami peningkatan, dimana tahun 2010 IDG Kalimantan Barat sebesar 55,26 dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu menjadi 73,18.

Walaupun dari segi kualitas perempuan dan partisipasi atau pemberdayaan perempuan diruang publik meningkat, jika dihubungkan dengan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan di Kalimantan Barat sangat jauh berbeda. Pengeluaran perkapita laki-laki tahun 2010 sebesar Rp 11,48 juta sementara perempuan hanya sebesar Rp 5,12 juta. Kemudian untuk tahun 2022 mengalami peningkatan tetapi tetap dengan proporsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp 13,95 juta dan perempuan sebesar Rp 6,42 juta. Yang artinya bahwa kesejahteraan perempuan di Kalimantan Barat masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan peningkatan pengeluaran perkapita perempuan lebih kecil dari peningkatan pengeluaran perkapita laki-laki.

Adanya fenomena yang saling mendukung antara penelitian yang sudah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yang menelaah hubungan antara kualitas SDM dan partisipasi perempuan dengan pendapatan atau kemiskinan yang diproxy dari pendapatan perkapita seperti penelitian Putrizahrah (2019); Syamsiyah (2015); Tran, Pham dan Nguyen (2021), dan dihubungkan dengan kondisi di Kalimantan Barat sebagai dugaan sementara, maka tentunya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk wilayah Kalimantan Barat. Maka berdasarkan permasalahan tersebut perlu dikaji, apakah yang terjadi dengan kualitas SDM perempuan yang dilihat dari pendidikan perempuan dan kesehatan perempuan dan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat dan bagaimana hubungannya dengan kesejahteraan perempuan atau kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan dan Kemiskinan Perempuan

Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi. Sen (1995) dalam Todaro (2011) menyatakan

bahwa “kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (low income), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan kapabilitas (capability handicap)”. Dihubungkan dengan kapasitas dan kapabilitas perempuan, penting dilakukan, memastikan adanya lingkungan yang mendukung bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ada norma dan inklusivitas yang mendukung perempuan memiliki kapasitas dan kapabilitas lebih sebagai strategi keluar dari kemiskinan (Widiastuty, 2021). Word Bank (2003) dalam Indraswari (2009), mengidentifikasikan 4 (empat) dimensi kemiskinan perempuan yaitu *women’s lack of empowerment, opportunity, capacity, security*.

Penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu: kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang dan kualitasnya rendah menjadi penyebab kemiskinan yang bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circles of poverty*). Lingkaran kemiskinan terutama yang terjadi pada kemiskinan perempuan, menurut Widiastuty (2019), perlu Copping strategy jitu apa agar perempuan mampu bertahan dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Penelitian (Samboel (2012) dalam Widiastuty (2019)) menyebutkan bahwa hambatan sosial dan budaya merupakan faktor utama yang memengaruhi perempuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalam kondisi pandemi saat ini, kiranya hambatan struktural, modal manusia dan institusional juga menjadi penting untuk ditangani.

Kemiskinan perempuan dalam konsep gender dimana pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang perempuan secara rata-rata lebih rendah dari pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang laki-laki. Semakin jauh perbandingan antara rata-rata pengeluaran perempuan dengan rata-rata pengeluaran laki-laki, maka yang menderita kemiskinan adalah perempuan, demikian sebaliknya. Pembangunan gender dan pemberdayaan gender, harus mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar seorang perempuan dan seorang laki-laki seimbang. Pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dapat tergambarkan dari pengeluaran perkapita. BPS (2023) mengemukakan pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity atau PPP).

Menurut Todaro (2011), kemiskinan lebih rentan terjadi pada perempuan. Perempuan memiliki keterbatasan terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, kesejahteraan sosial dan program kesempatan kerja, sehingga terciptalah lingkaran kemiskinan di dalamnya yang menciptakan kemiskinan kembali terutama diderita oleh kaum perempuan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Aripurnami, dkk (2006) yang menghubungkannya dengan kemiskinan perempuan bahwa dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda. Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan.

Konsep Gender dari Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi Perempuan

Merujuk BPS (2023) tentang Konsep Gender dimulai dengan istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

BPS menggunakan dua pendekatan umum untuk mengukur kesetaraan gender atau ketidaksetaraan gender, dengan pendekatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, kesehatan serta ekonomi. Sedangkan indikator IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender pada partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Menurut Widiastuty (2019), peningkatan kualitas hidup perempuan ditujukan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal, termasuk perempuan. Kualitas hidup yang baik memastikan kehidupan yang sehat dan berpendidikan akan mendukung kesejahteraan bagi seluruh penduduk pada semua usia dan tentunya meningkatkan kualitas ekonomi perempuan.

Kualitas hidup merupakan suatu representasi yang bersifat kompleks karena tidak hanya berupa ukuran yang dapat terlihat saja, tetapi juga termasuk yang tidak dapat diamati secara langsung (Galitsya (2017) dalam Widiastuty (2019)). Mehra (1997) dalam Widiastuty (2019) juga mengemukakan bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan tecermin pada indikator kunci yang meliputi peningkatan angka harapan hidup perempuan dan peningkatan partisipasi sekolah perempuan. Selanjutnya Bappenas (2023), kualitas hidup perempuan yang lebih baik dapat dicapai dengan peningkatan kesetaraan gender. Chioda dkk. (2011) dalam Widiastuty (2019) menyatakan bahwa peningkatan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan peluang pekerjaan bagi perempuan, serta pengembangan ke dunia luar.

Selanjutnya, berdasarkan dimensi kesetaraan gender di Indonesia, indikator yang signifikan terhadap kualitas hidup perempuan meliputi rasio angka harapan lama sekolah perempuan dibanding laki-laki, rasio rata-rata lama sekolah perempuan dibanding laki-laki, rasio jumlah pekerja dibayar perempuan dibanding laki-laki, rasio upah buruh/karyawan/pegawai perempuan dibanding laki-laki, persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknis, angka harapan hidup perempuan (BPS, 2022). Berbagai dimensi kemiskinan dan keterbatasan akses masyarakat erat kaitannya dengan hidup Perempuan (Indraswari, 2009). Sedangkan kualitas hidup perempuan erat kaitannya dengan akses perempuan terhadap ekonomi perempuan.

Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi perempuan dan Kemiskinan Perempuan

Berhubungan dengan kesetaraan gender dan kemiskinan terutama kemiskinan perempuan, Pemerintah Indonesia sudah mempromosikan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di bawah koordinasi Bappenas. Tetapi apakah komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian target-target pengurangan angka kemiskinan, sudah diikuti dengan arah dan perumusan strategi pencapaian target tersebut sudah responsif gender. Artinya pelibatan perempuan untuk semua kebijakan penurunan kemiskinan diikuti oleh peningkatan kesamaan status perempuan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan. Sehingga peran perempuan yang meningkat mengharuskan juga kesejahteraan perempuan meningkat dan perempuan tidak lagi sebagai kelompok yang paling merasakan kemiskinan.

Kemiskinan didefinisikan tidak hanya berkenaan dengan masalah ketimpangan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmampuan pengetahuan & ketrampilan, serta kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (Baiduri dan Fisabillah, 2022). Menurut Karl Marx, kebodohan dan kemiskinan saling beriringan, dan Amartya Sen, mengemukakan bahwa elemen dasar modal manusia adalah dunia pendidikan yang mempunyai peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Pendidikan yang baik bagi setiap perempuan menjadi bekal ketrampilan dan pengetahuannya, lebih berpeluang untuk bekerja, dan menjadi produktif dengan begitu akan meningkatkan pendapatan. Semakin banyak perempuan yang mendapatkan Pendidikan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, disebabkan karena perempuan berpendidikan mendapatkan pekerjaan bagus dan menaikkan kesejahteraan keluarga (Baiduri dan Fisabillah, 2022).

Menurut Noerdin, dkk (2006), berdasarkan banyak pengamatan bahwa pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan dan perempuan dibandingkan dengan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumber daya politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, strategi nasional dan lokal yang diimplementasikan bagi penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Masih menurut Noerdin, dkk (2006), apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

Kemiskinan pada perempuan terjadi salah satunya karena pendapatan yang diterima perempuan lebih rendah, sebagai akibat dari anggapan bahwa produktivitas perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Marshall berusaha menempatkan perempuan dalam pekerjaan dan hubungannya dengan isu gender. Neoklasikisme percaya bahwa produktivitas sangat menentukan output proses produksi pekerja yang akan berpengaruh terhadap pendapatan pekerja. Dalam hal ini, Neoklasik menekankan perbedaan produktivitas antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Dimana laki-laki cenderung memiliki modal manusia yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. (Ariani & Sari, 2022).

Morrison et al. (2007) dan Kabeer (2016) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Dengan lebih berpartisipasi perempuan dalam tenaga kerja, mengakibatkan penghasilan akan meningkat; dengan demikian sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga meningkat dan berakibat pada peningkatan pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Kajian Empiris

Magda I, Torzewska EC, Palczyńska M (2023), penelitian di Polandia, dengan menggunakan data “Generation and Gender Survey” menguji hubungan antara kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga dan pembagian pekerjaan rumah tangga antara pasangannya. Penemuan penelitian adanya hubungan negative antara keterlibatan perempuan dalam rumah tangga dengan sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga. Nisak dan Sugiharti (2020), penelitian kemiskinan perempuan di Indonesia, bahwa variabel kesehatan, tingkat pendidikan terakhir wanita, partisipasi kerja wanita, dan status kerja perempuan terbukti signifikan secara statistik dalam mempengaruhi kemiskinan individu perempuan baik sebagian atau seluruhnya.

Walid dan Pratama (2020), Kajian ini akan fokus pada pengembangan penelitian dalam analisis deskriptif dan inferensial gender pemerataan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil diperoleh bahwa program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah masih mengandung pengaruh perbedaan gender. Kesenjangan gender yang dimaksud terdapat pada variabel IPG, IDG, IPM, TKWP (perempuan sebagai profesional) dan SPP (pendapatan pekerja perempuan) yang pengaruh dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir.

Putrizahrah (2019), penelitian pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan menggunakan data tahun 2012-2017, yang hasilnya adalah variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel jumlah wanita yang bekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Fahmi (2016), penelitian di Provinsi Jambi menggunakan data tahun 2004-2014 bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data), yaitu kombinasi antara data time series 12 tahun (2010-2022) dan data cross section 14 Kabupaten/kota di Kalimantan Barat, kecuali tahun 2016 (karena tidak tersedia data), dengan sumber data Badan Pusat Statistik. Dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang berupa Usia Harapan Hidup (UHH) perempuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki hubungan yang sangat terkait satu sama lain dengan variabel dependen yaitu kemiskinan perempuan.

UHH Perempuan, HLS Perempuan dan RLS Perempuan mewakili indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah kualitas SDM perempuan, merupakan indikator kesehatan perempuan dan pendidikan perempuan yang angkanya adalah rasio dengan menggunakan konsep BPS (2023). IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. IDG dapat diinterpretasikan sebagai berikut : (1) Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil perbedaan partisipasi antara perempuan dengan laki-laki. (2) $IDG < 100$, partisipasi perempuan < partisipasi laki-laki. (3) $IDG = 100$, partisipasi perempuan sama dengan laki-laki. (4) $IDG > 100$, partisipasi perempuan > partisipasi laki-laki., menggunakan konsep BPS (2023).

Indikator dari kemiskinan perempuan atau rasio gender PPP adalah rasio pengeluaran perkapita perempuan dengan pengeluaran perkapita laki-laki. Pengeluaran perkapita disini menggunakan konsep BPS (2023), yaitu pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity atau PPP) atau rasio gender PPP. Interpretasi rasio gender PPP sebagai berikut : (1) Nilai rasio < 100, maka perempuan lebih miskin dari laki-laki. Semakin menjauhi angka 100 (lebih kecil dari 100), maka semakin parah kemiskinan perempuan. (2) Nilai rasio > 100, maka laki-laki lebih miskin dari perempuan. Semakin menjauhi angka 100 (lebih besar dari 100), maka kesejahteraan perempuan meningkat. Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin rendah kemiskinan perempuan, demikian sebaliknya yaitu semakin rendah rasio ini maka semakin tinggi kemiskinan perempuan.

Dalam penelitian ini dilakukan uji pemilihan model dengan hasil nilai probabilitas pada uji Chow, Uji Hausman, selanjutnya Uji Lagrange Multiplier. Kemudian analisis data menggunakan regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program Eviews 12 dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Adapun bentuk regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 UHH_{Pr} + \beta_2 HLS_{Pr} + \beta_3 RLS_{Pr} + \beta_4 IDG_{it} + e_{it}$$

Dimana :

Y = Rasio gender PPP (Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan terhadap Pengeluaran Perkapita Laki-Laki), α = Konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi, UHH Pr = Usia Harapan Hidup Perempuan, HLS Pr = Harapan Lama Sekolah Perempuan, RLS Pr = Rata-Rata lama Sekolah Perempuan, IDG = Indeks Pemberdayaan Gender, i = jumlah sampel, t = periode waktu, e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari uji model diperoleh bahwa *Random Effect Model* direkomendasikan dalam penelitian ini. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan kualitas perempuan yang diwakili oleh usia harapan hidup perempuan (UHH Pr), harapan lama sekolah perempuan (HLS Pr), rata-rata lama sekolah perempuan (RLS Pr) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh signifikan terhadap rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap pengeluaran perkapita laki-laki atau kemiskinan perempuan, dengan tingkat signifikansinya sebesar 49,47%. Berarti apabila kesetaraan gender semakin meningkat yang artinya kualitas sumber daya perempuan dan pemberdayaan perempuan meningkat, maka akan memberi pengaruh pada peningkatan nilai rasio pengeluaran perkapita perempuan terhadap pengeluaran perkapita laki. Berarti jika kualitas perempuan dan pemberdayaan perempuan semakin meningkat akan memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan perempuan, sehingga kemiskinan perempuan turun.

Tabel 4.1. Hasil Uji Regresi Berganda dengan Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.54174	8.922371	-1.853963	0.0656
UHH_X1	0.443015	0.136998	3.233743	0.0015
HLS_X2	1.187955	0.644362	1.843614	0.0671
RLS_X3	2.769636	0.874721	3.166308	0.0018
IDG_X4	-0.037402	0.053131	-0.703960	0.4825
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			7.651655	0.8687
Idiosyncratic random			2.975088	0.1313
Weighted Statistics				
R-squared	0.506858	Mean dependent var		5.094040
Adjusted R-squared	0.494756	S.D. dependent var		4.285730
S.E. of regression	3.012577	Sum squared resid		1479.326
F-statistic	41.88339	Durbin-Watson stat		0.549818
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.390511	Mean dependent var		45.05292
Sum squared resid	13262.61	Durbin-Watson stat		0.061327

Sumber : Hasil olah data Eviews 12 (2023)

Pengaruh Usia Harapan Hidup Perempuan (UHH Pr) Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik UHH Pr sebesar 3,233743 dengan probabilitas sebesar 0,0015 hal ini menunjukkan bahwa UHH Pr berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Nilai koefisien UHH Pr sebesar 0,443015 yang artinya jika UHH Pr meningkat 1 persen maka rasio gender PPP akan meningkat sebesar 0,443015 persen. Ini menunjukkan bahwa jika UHH Perempuan meningkat akan meningkatkan nilai pengeluaran perkapita perempuan yang semakin mendekati nilai pengeluaran perkapita laki-laki, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Dan dapat disimpulkan bahwa derajat kesehatan perempuan yang semakin tinggi di Kalimantan Barat dapat menurunkan kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Pembangunan kesehatan perempuan yang terbentuk dari meningkatnya akses perempuan terhadap kesehatan di Kalimantan Barat berakibat pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia perempuan, yang tentunya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan perempuan, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Indraswari (2009), Putri (2019), Nisak & Sugiarti (2020) dan Lesetedi (2018) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender pada akses perempuan pada kesehatan yang berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia perempuan, mengakibatkan penghasilan perempuan meningkat, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Dari hasil penelitian, jelas bahwa ada keterkaitan yang erat antara pembangunan gender bidang kesehatan dalam upaya membentuk kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Sehingga akan menjadi temuan penting bahwa jika ingin menghilangkan kemiskinan pada perempuan maka perlu upaya peningkatan sumber daya perempuan baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dan upaya peningkatan sumber daya perempuan yang dilakukan pemerintah selama ini adalah terutama adanya upaya peningkatan akses perempuan terhadap kesehatan. Hal ini tergambar dari capaian indikator kesehatan yang salah satunya sebagai pembentuk IPG, seperti usia harapan hidup perempuan, harapan lama sekolah perempuan dan rata-rata lama sekolah perempuan. Dari data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2010 dan tahun 2022, terjadi peningkatan indikator sumber daya perempuan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Usia harapan hidup perempuan meningkat dari 67,11 tahun menjadi 73,00 tahun.

Pengaruh Harapan Lama Sekolah Perempuan (HLS Pr) Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik HLS Pr sebesar 1,843614 dengan probabilitas sebesar 0,0671 hal ini menunjukkan bahwa HLS Pr berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Tidak signifikan Harapan Lama Sekolah Perempuan terhadap kesejahteraan perempuan dan kemiskinan perempuan ini dikarenakan walaupun HLS perempuan meningkat dimasa akan datang, takan tetapi kesempatan dan akses perempuan pada aktifitas ekonomi dan sosial sekarang ini masih relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Perlu untuk meningkatkan harapan lama sekolah perempuan dimasa sekarang ini dan seterusnya, karena kedepannya diperlukan perempuan yang berkualitas sehingga suatu saat nanti terjadi kesetaraan gender untuk bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang berkualitas, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa akan datang, sehingga kesejahteraan meningkat dan tidak ada perbedaan lagi antara kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan Nisak & Sugiarti (2020) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender pada akses perempuan untuk kesehatan yang berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia perempuan, mengakibatkan penghasilan perempuan meningkat, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Dari hasil penelitian, jelas bahwa tidak signifikannya harapan lama sekolah perempuan dan kesejahteraan atau kemiskinan perempuan, tergambar dari data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2020 dan tahun 2022, terjadi peningkatan HLS perempuan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dan lebih tinggi dari laki-laki. Tahun 2020 HLS perempuan 12,63 lebih tinggi dari laki-laki 12,57 dan tahun 2022 HLS perempuan 12,99 lebih tinggi dari laki-laki 12,69. Sementara tahun 2020 PPP Pr hanya sebesar Rp 6.134.000 dan PPP laki-laki Rp 13.313.000 dan tahun 2022 PPP perempuan 6.417.000 dan laki-laki Rp 13.950.000.

Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLS Pr) Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik RLS Pr sebesar 3,166308 dengan probabilitas sebesar 0,0018 hal ini menunjukkan bahwa RLS Pr berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Nilai koefisien RLS Pr sebesar 2,769636 yang artinya jika RLS Pr meningkat 1 persen maka rasio gender PPP akan meningkat sebesar 2,769636 persen. Ini menunjukkan bahwa jika RLS Perempuan meningkat akan meningkatkan nilai pengeluaran perkapita perempuan yang semakin mendekati nilai pengeluaran perkapita laki-laki, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Dan dapat disimpulkan bahwa derajat pendidikan perempuan yang semakin tinggi di Kalimantan Barat dapat menurunkan kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Pembangunan kesehatan perempuan yang terbentuk dari meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan di Kalimantan Barat berakibat pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia perempuan, yang tentunya berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan perempuan, sehingga menurunkan kemiskinan perempuan. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Indraswari (2009), Nisak & Sugiarti (2020) dan Lesetedi (2018) mengamati bahwa terjadi peningkatan kesetaraan gender pada akses perempuan pada pendidikan yang berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia perempuan, mengakibatkan penghasilan perempuan meningkat, sehingga perempuan terhindar dari kemiskinan.

Dari hasil penelitian, jelas bahwa ada keterkaitan yang erat antara pembangunan gender bidang pendidikan dalam upaya membentuk kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan. Sehingga akan menjadi temuan penting bahwa jika ingin menghilangkan kemiskinan pada perempuan maka perlu upaya peningkatan sumber daya perempuan baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Dan upaya peningkatan sumber daya perempuan yang dilakukan pemerintah selama ini adalah terutama adanya upaya peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan. Hal ini tergambar dari capaian indikator pendidikan yang salah satunya sebagai pembentuk IPG, seperti rata-rata lama sekolah perempuan. Dari

data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2010 dan tahun 2022, terjadi peningkatan indikator sumber daya perempuan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dimana rata-rata lama sekolah dari 5,61 menjadi 7,18 tahun.

Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Kemiskinan Perempuan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat diketahui bahwa nilai t-statistik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar -0,776421 dengan probabilitas sebesar 0,4387 yang menunjukkan bahwa IPG berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio gender PPP di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan. IDG tidak memberi pengaruh pada rasio gender pengeluaran perkapita. Hal ini bisa terjadi karena pemberdayaan gender yang terbentuk dari partisipasi/peran perempuan diparlemen dan perempuan sebagai tenaga profesional di Kalimantan Barat masih sangat rendah. Dengan kecilnya peran atau kontribusi perempuan diruang publik secara umum yang berakibat pada kontribusi pada kesejahteraan perempuan rendah. Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Walid dan Pratama (2020), dan Prettner dan Strulik (2014), dimana perempuan sebagai profesional dan program pemberdayaan perempuan berpengaruh dengan tingkat kemiskinan perempuan.

Hasil penelitian ini yang menggambarkan tidak signifikannya hubungan antara pemberdayaan gender (IDG) dengan rasio gender PPP atau dengan kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat, dikarenakan variabel pembentuk IDG yaitu masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen dan masih rendah peran perempuan sebagai profesional, sehingga secara rata-rata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan. Dari data BPS (2023) dengan membandingkan data tahun 2010 dan tahun 2022, kiprah perempuan diparlemen pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih sangat rendah. Parlemen di Kalimantan Barat masih didominasi oleh laki-laki. Tahun 2010 hanya 10,77 persen perempuan di Parlemen dan tahun 2022 hanya 18,46%, sementara adalah laki-laki. Tidak ada satu kabupaten/kotapun partisipasi perempuan diparlemen yang mencapai 30% (sebagai dasar kepatutan calon legeslatif pada saat pemilu). Malah masih ada kabupaten/kota dengan jumlah perempuan di DPRD/DPR yaitu Kabupaten Mempawah (8,57%), Kabupaten Ketapang (8,89%), Kabupaten Kapuas Hulu (6,67%), Kabupaten Sekadau (3,33%). Malah Kabupaten Kayong Utara (0,00%) yang sebelumnya tahun 2015 sebesar 8,00%. Sementara perempuan sebagai profesional di Kalimantan Barat juga dengan persentase yang masih dibawah laki-laki. Tahun 2015 sebanyak 46,77% dan tahun 2022 sebanyak 45,26%, dan selama hampir 10 tahun tidak mengalami perubahan.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kualitas perempuan dari indikator pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan perempuan secara bersama berpengaruh terhadap kemiskinan perempuan. Sementara secara parsial, kualitas kesehatan perempuan yang diwakili oleh usia harapan hidup perempuan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Kualitas pendidikan perempuan yang diwakili oleh harapan lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat dan pembangunan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan di Kalimantan Barat. Berdasarkan temuan ini maka direkomendasikan untuk melepaskan perempuan dari belenggu kemiskinan, modal awal yang paling harus diperhatikan adalah memperluas akses perempuan miskin terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan upaya peningkatan partisipasi perempuan diruang publik. Menghilangkan atau menurunkan kemiskinan pada perempuan maka perlu upaya peningkatan kesempatan perempuan untuk berkiprah, terutama kesempatan yang sama dengan laki-laki di dunia politik, sosial dan ekonomi. Harus ada kesadaran dan aksi nyata dari semua pihak

untuk memberdayakan perempuan dalam semua bidang. Secara umum memperlihatkan bahwa perempuan kurang berdaya, kurang kesempatan dan kurang kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. N., & Sari, A. N. (2022). *Analysing the effect of gender inequality on labor productivity in West Java Province*. *International Journal Of Research In Business And Social Science*, 11(1), 130-137
- Aripurnami S, Noerdin E, Agustini E, Pakasi DT, Hodijah SN (2006). *Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute. Jakarta, ISBN/ISSN 979-993-054-5.
<https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/>
- Badan Pusat Statistik. (2015-2021). *Konsep Gender*. <https://www.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik (2022). *Kajian Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2022*.
<https://www.bps.go.id/publication/download>.
- Baidury, Almas dan Fisabilillah, Ladi.WP (2022). *Pengaruh Pendidikan Perempuan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. Independent : *Journal Of Economics* E-ISSN:2798-5008. Page:102-109. Vol.2. No 3.<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- Bappenas (2023). *Sekilas tentang SDGs*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Fahmi, Ali (2016). *Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi*, *Jurnal Development*. Hal 90-121.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2172163&val=21907>
- Indraswari (2009). *Perempuan dan Kemiskinan*. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 14, No.2 Sept 2009.
<https://www.neliti.com/id/publications/545/perempuan-dan-kemiskinan>.
- Kabeer, N. (2016). *Gender Equality, Economic Growth, and Women's Agency: The Endless Variety and Monotonous Similarity of Patriarchal Constraints*. *Feminist Economics*. Volume 22 (1): 295-321.
- Magda I, Torzewska EC, Palczyńska M (2023), *What if She Earns More? Gender Norms, Income Inequality, and the Division of Housework*. *Journal of Family and Economic Issues*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10834-023-09893-0>. May 10, 2023.
- Morrison, A., Raju, D., Sinha, N. (2007). *Gender Equality, Poverty and Economic Growth*". *World Bank Policy Research Working Paper* 4349.
- Noerdin.E., Agustini.E, Pakasi,D.T, Aripurnami.S, Hodijah.S.N. (2006) *Potret Kemiskinan Perempuan*, Women Research Institute, ISBN: 979-99305-4-5
- Nisak.S.S dan Sugiharti.L (2020). *Gender Inequality and Women Poverty in Indonesia*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Volume 11, Issue 9, 2020- hal 375-387.
www.ijicc.net.
- Putrizahrah, Anisa (2019), *Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Jumlah Wanita Yang Bekerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*,
file:///C:/Users/USER/Downloads/5813-11311-1-SM.pdf
- Sabilla.K. (2023), *Kemiskinan tidak selalu netral gender, perempuan lebih menderita akan dampaknya*. *The Conversation*. 7 Maret 2023. <https://theconversation.com/kemiskinan-tidak-selalu-netral-gender-perempuan-lebih-menderita-akan-dampaknya-200637>.
- Syamsiyah, Dailatus (2015), *Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Millenium Development Goals*, *Palastren*, Vol.8,No.2,Des2015,halaman225-242.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/965/879>.
- Todaro, M.P.& Smith,S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tran,D.B; Pham,T.D.N; Nguyen,T.T (2021), *The influence of education on women's well-being: Evidence from Australia*, *Research Article*. *Plos One*,
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247765#sec00>, March 24, 2021. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7990187/>

- Walid dan Pratama.B.R.(2020), *Analysis of Gender Inequality in Poverty Reduction Program*, Economics Development Analysis Journal9(4) (2020), ISSN 2252-6560, 482-297. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Widiastuty,I.S. (2019). Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup Di Jawa Barat. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol 14, no. 2. Desember 2019. p-ISSN : 1907-2902 (*Print*), e-ISSN : 2502-8537 (*Online*).
- Widiastuty,I.S. (2021). Perempuan, Kemiskinan, dan Pandemi. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Barat. 14 Maret 2021. <https://kumparan.com/istilaras/perempuan-kemiskinan-dan-pandemi-1vLudUXp6zd/full>.